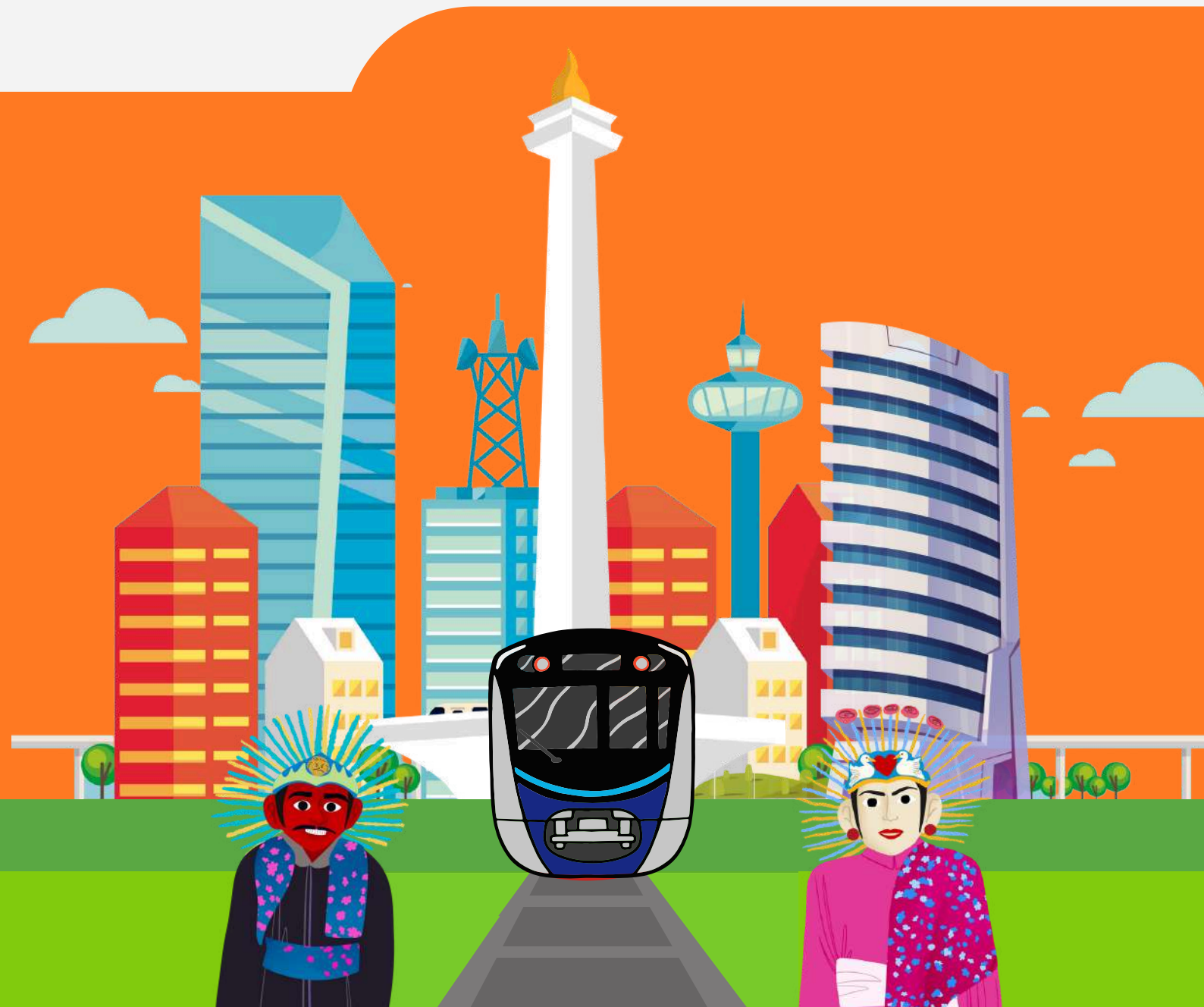




INFORMASI APBD 2026

“Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.





Pertumbuhan PDRB
(Triwulan III 2025)

4,96 %



Indeks GINI
(Maret 2025)

0,44



Inflasi
(November 2025)

2,67 %



Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(Agustus 2025)

64,75 %



Tingkat Kemiskinan
(per Maret 2025)

4,28 %

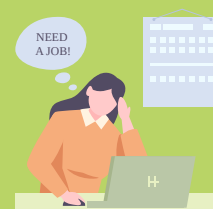


Indeks Pembangunan
Manusia
(2025)

85,05 %



Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah DKI Jakarta



Tingkat Pengangguran
Terbuka
(per Agustus 2025)

6,05 %

POSTUR APBD 2026

81,32 T

Penerimaan Daerah

Pendapatan Daerah 71,45 T

Pendapatan Asli Daerah 57,67 T

- Pajak Daerah 49,89 T
- Retribusi Daerah 2,21 T
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 876 M
- Lain-Lain PAD Yang Sah 4,68 T

Pendapatan Transfer 11,15 T

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2,62 T

Penerimaan Pembiayaan Daerah 9,87 T

SILPA Tahun Sebelumnya 5,05 T

Penerimaan Pinjaman Daerah 4,82 T



81,32 T

Pengeluaran Daerah

Belanja Daerah 74,28 T

- Belanja Operasi 63,21 T
- Belanja Modal 10,16 T
- Belanja Tidak Terduga 714,11 M
- Belanja Transfer 195,28 M

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 7,04 T

Penyertaan Modal Daerah 5,23 T

Pembayaran Pokok Utang 1,81 T



Pendapatan Daerah



ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pajak Daerah 49,89 T



Adapun kebijakan pajak daerah di DKI Jakarta untuk APBD tahun 2026 adalah:

- ✓ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- ✓ Implementasi Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (khususnya yang berkenaan dengan tarif Pajak Parkir).
- ✓ Penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum, peningkatan layanan, dan tata kelola pajak daerah.
- ✓ Implementasi Kebijakan Pajak Daerah perihal Pemberian Insentif Pajak Daerah.

Retribusi Daerah 2,21 T

Adapun kebijakan retribusi daerah di DKI Jakarta untuk KUA Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

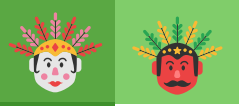
- ✓ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ✓ Penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum, peningkatan layanan retribusi, dan tata kelola retribusi daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

876 M

- ✓ Mengoptimalkan kontribusi BUMD dan perusahaan patungan dengan strategi sinergi, efisiensi, inovasi digital, dan tata kelola yang kuat.
- ✓ Meningkatkan kinerja BUMD sebagai entitas bisnis yang sehat, adaptif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan ekonomi Jakarta sebagai kota global.





ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat **11,15 T**

- Berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran pendapatan transfer dapat optimal dan tepat waktu.
- Memenuhi nilai kinerja penerimaan pajak untuk mencapai penyaluran DBH Pajak Penghasilan yang optimal.
- Mengoptimalkan penggunaan DAK untuk mendukung program prioritas nasional.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) Yang Sah

4,68 T

- Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah pemungut LLPAD.
- Implementasi sistem monitoring LLPAD guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah
2,62 T

- Berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan PT Jasa Raharja sebagai pemberi hibah.
- Mengoptimalkan hibah untuk pembiayaan pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 dan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap I yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.



Pembiayaan Daerah





ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan



SILPA
5,05 T

Pengalokasian Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran 2025.



**Penerimaan
Pinjaman Daerah**
4,82 T



Pinjaman Daerah dari Pemerintah
yang Diteruspinjamkan kepada
Pemerintah Daerah berupa
Pinjaman Pembangunan MRT **2,62 T**



Pinjaman Daerah **2,20 T**



Pengeluaran Pembiayaan

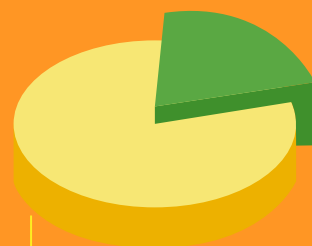


**Penyertaan Modal Daerah
(PMD)**
5,23 T

PT MRT Jakarta **5,23 T**

**Pembayaran
Pokok Utang**
1,81 T

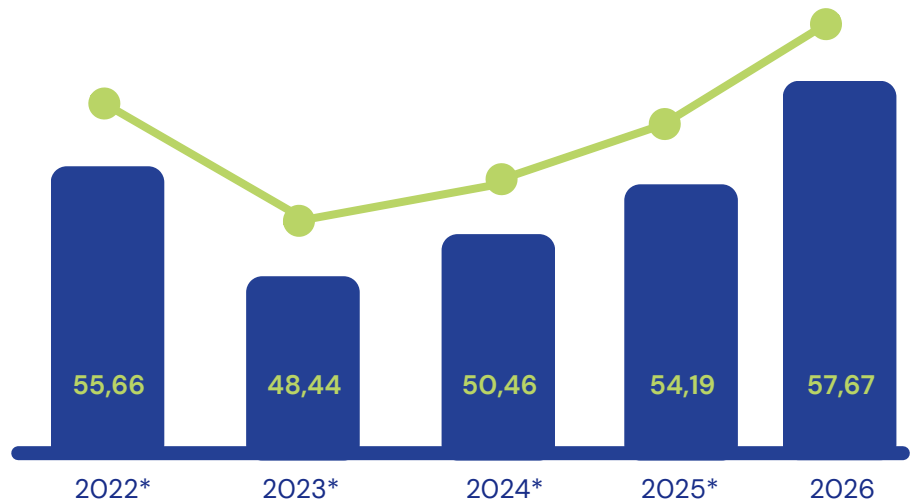
Pembayaran Pinjaman
Daerah dari Pemerintah
Pusat **243,63 M**



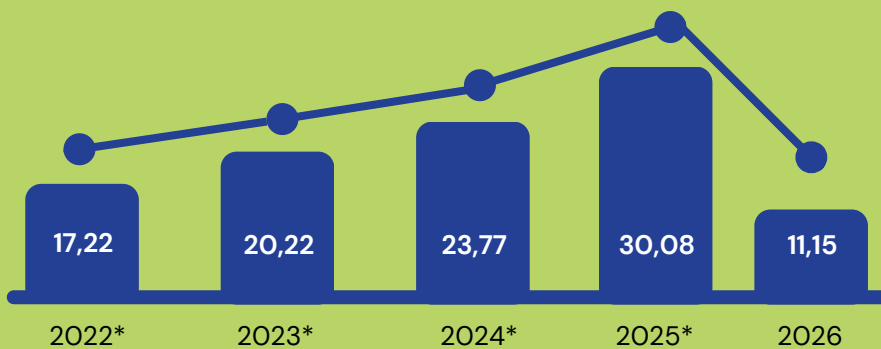
Pembayaran Pinjamann dari
Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB) – PEN **1,56 T**

RINCIAN PENDAPATAN (DALAM TRILIUN RUPIAH)

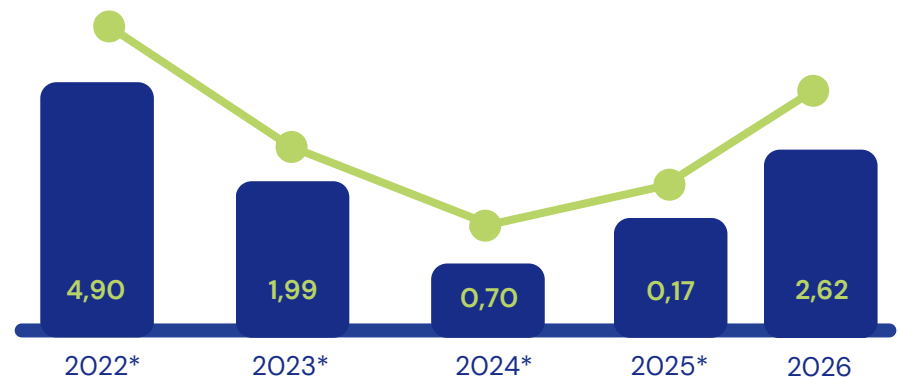
Pendapatan Asli Daerah



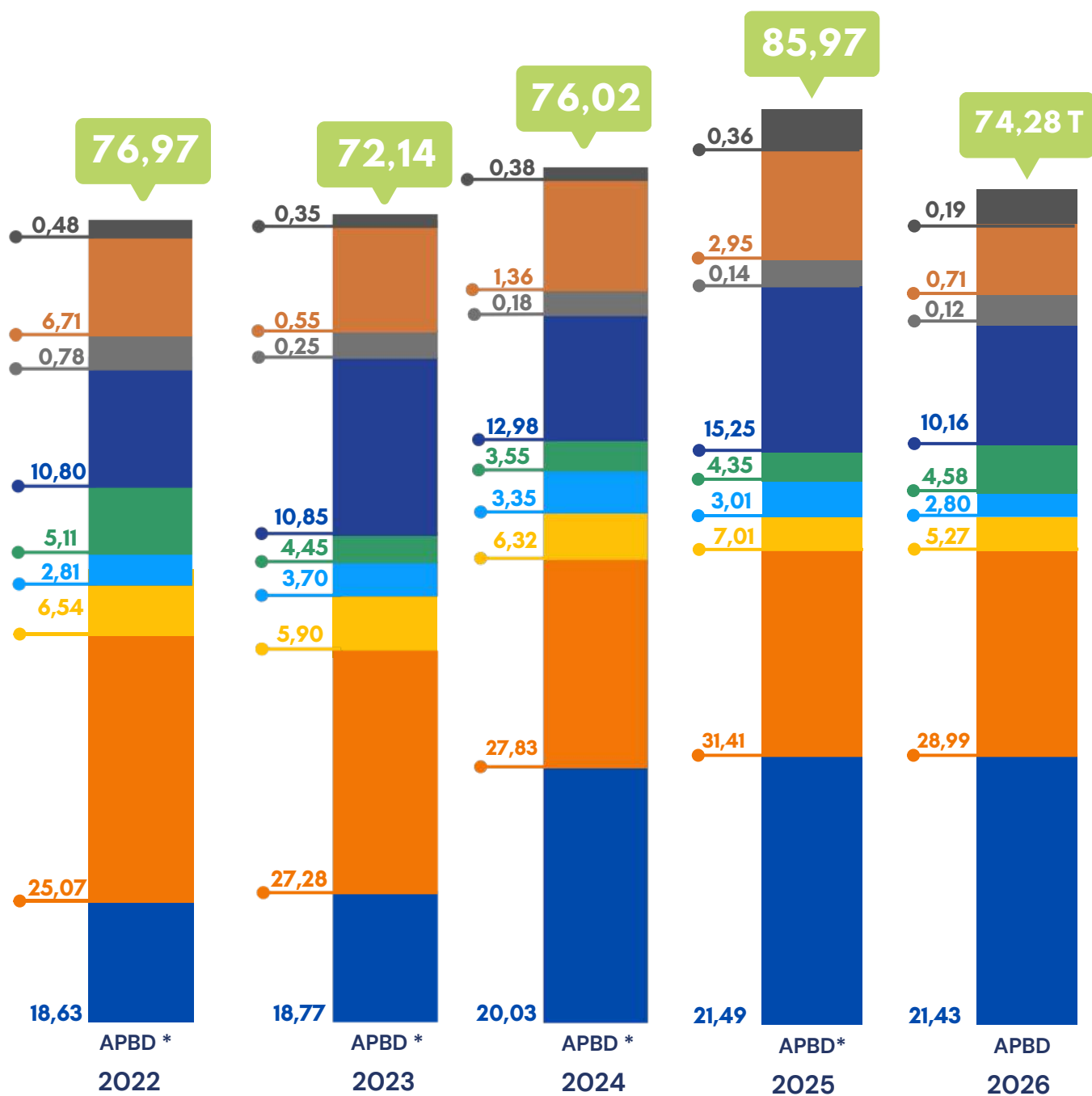
Pendapatan Transfer



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



RINCIAN BELANJA (DALAM TRILIUN RUPIAH)



● Belanja Pegawai

● Belanja Barang dan Jasa

● Belanja Bunga

● Belanja Subsidi

● Belanja Hibah

● Belanja Bantuan Sosial

● Belanja Modal

● Belanja Tidak Terduga

● Belanja Transfer

* Perubahan APBD

RINCIAN PEMBIAYAAN (DALAM TRILIUN RUPIAH)

	2022*	2023*	2024*	2025*	2026
 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5,01	8,89	10,25	7,40	9,87
 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,83	7,41	9,17	5,88	7,04
 PEMBIAYAAN NETTO	(0,82)	1,48	1,07	1,52	2,83

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

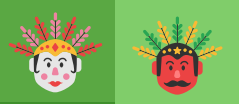
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya 5,05 T
Penerimaan Pinjaman Daerah 4,82 T

9,87 T

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Daerah 5,23 T
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang
Jatuh Tempo 1,81 T

7,04 T



MANDATORY SPENDING



Anggaran Fungsi Pendidikan

19,75 T (26,59%)

Minimal 20% dari total belanja daerah*

Anggaran Belanja Pegawai

20,03 T (26,97%)

Maksimal 30% dari total belanja daerah diluar TPG, TKG, dan Tamsil*

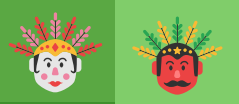


Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik

31,90 T (43,06%)

Minimal 40% dari total belanja daerah diluar bantuan keuangan*

*sesuai dengan Permendagri nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026



ISU STRATEGIS



Penanganan
Sampah **2,50 T**



Pencegahan
Stunting **9,16 T**

Pengendalian
Banjir **5,51 T**



Penanggulangan
Kemiskinan **20,74 T**



Penanganan
Kemacetan **7,81 T**



PROGRAM PRIORITAS



Peningkatan Infrastruktur Kota
yang Layak dan Memadai **3,77 T**



Peningkatan Produktivitas dan Daya
Saing Ekonomi yang Berkelanjutan **582 M**



Peningkatan Modal Manusia
yang Berdaya Saing **17,58 T**



Penciptaan Penghidupan
Masyarakat yang Layak dan
Mandiri **2,70 T**



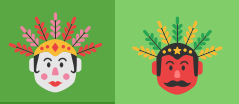
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
yang Dinamis dan Responsif **2,36 T**



Penciptaan Mobilitas dan Kawasan
Berorientasi Transit **7,82 T**



Optimalisasi Pembangunan
Rendah Karbon dan Berketahanan
Iklim **6,27 T**



URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

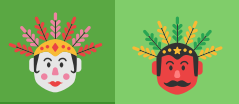


Pengendalian
Banjir **3,64 T**

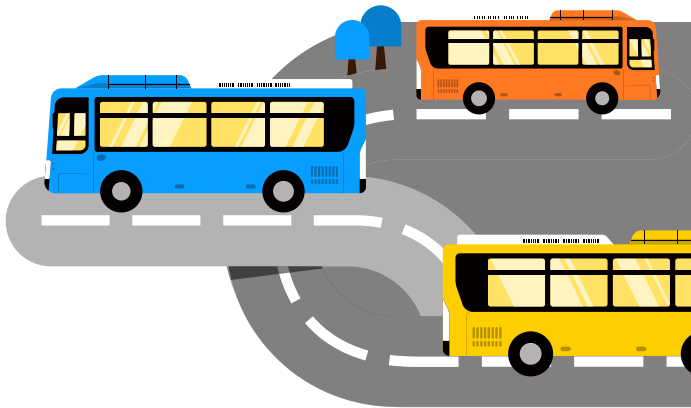
Pengelolaan
1,38 T Sampah



Pembangunan
Jembatan dan Fly Over
289,73 M



URUSAN PERHUBUNGAN



Subsidi
Transjakarta

3,75 T

Bus
Sekolah

105,38 M



Subsidi
MRT

536,70 M

Subsidi
LRT

325,28 M

Layanan Kapal
Angkutan Perairan

100,19 M



Pengadaan Lahan untuk
Pembangunan MRT Fase-2
10,18 M

Pengadaan Lahan Untuk
Pembangunan MRT East-West
255,50 M



Pengembangan dan
Peningkatan ITS Traffic Light

166,30 M

Penertiban
Lalu Lintas
157,23 M



Perlengkapan Jalan
dalam rangka
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
184,46 M



URUSAN KETENAGAKERJAAN



Pembentukan
Tenaga Kerja Mandiri
4,33 M



Pelatihan Satuan
Pengamanan
1,85 M



Pelatihan Peningkatan
Produktivitas
1,25 M



Pelatihan
SIM A
1,21 M



Pameran Bursa Kerja
(Job Fair)
4,46 M

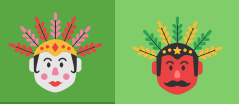


Pelatihan Keterampilan
Kerja Kejuruan dan MTU
63,44 M



URUSAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN





URUSAN PENDIDIKAN



KJP
3,25 T



KJMU
399 M



Pengadaan Alat Praktik
dan Peraga Peserta Didik
3,03 M



Pengadaan
Meubelair Sekolah
14,06 M



BOP
1,18 T



BOSP Negeri (DAK)
1,08 T



BOSP Swasta (DAK)
736,41 M



BOSP PAUD (DAK)
78,90 M



BOSP Kesetaraan (DAK)
44,30 M

Penyediaan Sekolah
Swasta Gratis

282,46 M



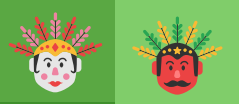
Kegiatan BLUD
12 SMKN
32,04 M

Rehab Sekolah dan
Fasilitas Pendidikan

126,12 M

Program
Kantin Sehat

3,01 M



URUSAN KESEHATAN

Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan
76,06 M

Pembangunan
Fasilitas Kesehatan
360,49 M

Penyedia Alat
Kesehatan
165,16 M

Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
pada Kondisi KLB
1,56 M

JAMKESDA
(BPJS)
1,40 T

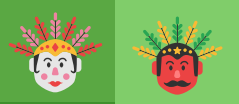
BLUD
3,77 T



Pasukan
Putih
43,49 M



Penyedia Makanan
Tambahan (PMT)
54,46 M



URUSAN SOSIAL



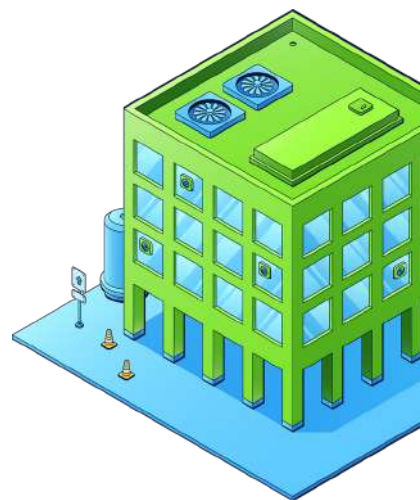
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Kartu Lansia Jakarta)

625,89 M



Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak (Kartu Anak Jakarta)

100,10 M



Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta)

76,45 M



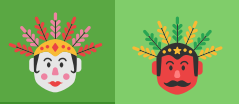
Bantuan Penanggulangan Bencana

26,04 M



Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik

17,47 M



Informasi
APBD 2026



URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Managed
Service CCTV
185,29 M



Sistem
Pengendalian Banjir
18,25 M

ASTA CITA



Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

7,62 M



Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

70,33 M



Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

59,56 M



Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

355,63 M



Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

217,99 M



Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

364,60 M



Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

3,94 T



Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

222,47 M



INFORMASI APBD DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026